BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asuh anak (*hadhanah*) dalam konteks perceraian merupakan salah satu aspek yang paling krusial dalam ranah hukum keluarga di Indonesia.¹ Penentuan hak asuh anak tidak hanya berdampak pada kehidupan anak dalam jangka pendek, tetapi juga sangat menentukan masa depan dan perkembangan psikologis anak tersebut.² Hal ini menjadikan keputusan pengadilan terkait hak asuh anak sebagai suatu hal yang memerlukan pertimbangan yang sangat cermat dan komprehensif.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak telah diatur secara sistematis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.³ Bagi umat Islam, ketentuan ini diperjelas lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memberikan panduan lebih spesifik mengenai penentuan hak asuh anak, termasuk kriteria dan persyaratan pemegang hak asuh.⁴

Menurut Amir Syarifuddin, hak asuh anak (*hadhanah*) dalam pengertian sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam pengertian yang

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 166.

² Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga: Peranan Ayah dalam Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 113

³ Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam

lebih luas, *hadānah* adalah pemeliharaan anak yang masih di bawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri.⁵

Menurut ulama fikih hak asuh anak (*hadānah*) adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga sesuatu dari yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁶

Selain itu, hak asuh anak (*Hadānah*) juga dimaknai sebagai penetapan yang memberikan kewenangan kepada salah satu pihak, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mengurus dan memenuhi kebutuhan seorang anak yang belum *mumayyiz*, baik secara moril maupun materil, guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri.⁷

Dengan kata lain, anak yang lahir dalam suatu perkawinan pada dasarnya merupakan kewajiban kedua orang tuanya untuk mengasuh dan memeliharanya, hingga ia tumbuh dewasa, mandiri, kuat dan mampu menjalankan kehidupannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

Namun, untuk mendapatkan hak asuh anak atau hak memelihara dan merawat anak (*hadānah*) terkadang karena sikap ego dan emosional yang

⁵ Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjar Baru. *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam Sinergitas Teks-Konteks* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), h. 2.

⁶ Mansari dan Reza Maulana. "Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayyiz Pasca Perceraian," dalam *Jurnal Yudisial*. (Vol. 11, No. 1, April 2018), h. 56.

⁷ Tim Penyusun Pengadilan Agama Banjar Baru. *Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam*, h. 3

berlebihan menyulut potensi konflik yang berkepanjangan hingga tak jarang melibatkan anggota keluarga masing-masing suami istri. Bahkan sering pula masing-masing pihak, suami-istri bersikukuh merasa paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak (Haḍānah) hingga mengabaikan hak dan kepentingan terbaik bagi anak untuk mendapatkan hak pemeliharaan atau pengasuhan terbaik dari kedua orangtuanya.

Hak asuh anak (*hadhanah*) merupakan salah satu praktik yang selalu ditetapkan dalam kasus perceraian di mana salah satu orang tua diberikan hak asuh atas anak oleh pengadilan sementara yang lain memiliki hak berkunjung terutama ketika pihak tidak lagi dalam ikatan pernikahan yang baik. Hal ini sangat berkaitan dengan hak orang tua dan anak dimana kedua orang tua memiliki hak untuk bersama anak-anaknya dan sebaliknya. Kegagalan untuk mengikuti perintah pengadilan dapat menyebabkan para pihak melakukan pengingkaran terhadap putusan pengadilan dan menimbulkan implikasi pada anak.⁸

Konflik perebutan hak asuh anak yang dilakukan oleh kedua orangtuanya tidak justru melindungi hak-hak dan kepentingan anak sebagaimana diatur dalam UU. Konflik perebutan anak justru telah merusak kepentingan, hak-hak dan perkembangan hidup si anak, terlebih jika sampai si anak diculik, dibawa paksa dengan kekerasan, disekap, ditarik-tarik oleh kedua orang tuanya, dan kekerasan fisik lainnya, jelas mengesampingkan seluruh hak anak yang diatur dalam UU Perlindungan anak.

⁸ Salleh, A., & Arshad, A. Child Custody and Access during Pandemic: Being In the Limelight. *International Journal of Law, Government and Communication*, 5, (2020). 191–210. <https://doi.org/10.35631/IJLGC.5210014>

Masalah perebutan anak tidak berhenti dengan ditentukannya siapa pemegang hak asuh si anak, ayah kandungnya atau ibu kandungnya melalui putusan pengadilan yang *inkracht*, proses terus berlanjut dengan eksekusi penyerahan anak kepada orang tua yang berhak sangat sulit dilakukan, ditambah lagi tindakan orang tua yang tidak berhak membawa lari anaknya hingga mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh si anak, dan proses-proses lain yang sangat merugikan anak. Akibatnya anak terus terombang-ambing dalam perebutan orang tuanya.

Secara moral, tidak seharusnya orang tua memperebutkan anak hanya demi kepentingan egosentris orang tua. Orang tua seharusnya bisa berbesar hati atas putusan pengadilan mengenai hak asuh anak jika memang hal tersebut nyata demi kepentingan anak. Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai “hak asuh anak” sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, namun untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yakni ditangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik.⁹

Hal yang kerap kali ditemukan dalam beberapa gugatan hak asuh anak, hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara hak asuh anak mempunyai penalaran dan pertimbangan hukum yang beragam. Beberapa hakim memutuskan berdasarkan pendekatan yuridis, beberapa hakim lainnya menggunakan pendekatan normatif-teologis, dan sebagian lainnya menggunakan pendekatan progresif dan sosiologis. Perbedaan pertimbangan

⁹ Ramadhan, S., & Muslimin, J. (2022). Indonesian Religious Court Decisions on Child Custody Cases: Between Positivism and Progressive Legal Thought. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(1), 89-100. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i1.5723>

hukum ini menyebabkan putusan yang berbeda dalam mengartikan keadilan bagi kasus hak asuh anak khususnya mengenai pemenuhan kebutuhan anak.¹⁰

Disamping itu Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan sengketa hak asuh anak mendasarkan pada Pasal 45 UU perkawinan sebagaimana tersebut di atas dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;¹¹

Bahkan, Pasal 105 huruf (c) justru memberikan ketentuan yang lebih ‘memanjakan’ ibu, yang pada pokoknya, yaitu sekalipun hak asuh anak berada di bawah ibu, bapak tetap berkewajiban menanggung biaya hadhanah tersebut. Menurut Pasal 149 huruf (d) KHI kewajiban ini berlaku sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mampu berdiri sendiri (mandiri). Dari ketentuan tersebut jelas dan tegas, bahwa anak yang masih di bawah umur atau belum *mumayyiz*, menjadi hak ibu untuk mengasuhnya.

Hal ini diperjelas dalam Islam dari Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ

وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

¹⁰ Renita Ivana & Diana Tantri Cahyaningsih, “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak”, dalam Jurnal Privat Law, Vol 8, No. 2 (2020)

¹¹ Pasal 105 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

“Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku “.

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah”.¹²

Meskipun demikian, hakim bisa untuk melakukan penyimpangan terhadap pasal-pasal tersebut di atas. Pasal-pasal tersebut pada umumnya memberikan ketentuan, bahwa dalam hal mengasuh anak, kepentingan terbaik bagi anak harus mendapatkan tempat paling tinggi. Atau dengan kalimat lain, bahwa kepentingan terbaik anak, harus lebih diprioritaskan dari kepentingan dua orang tua yang pada umumnya, masing-masing mengukur dari sisi kepentingan dirinya sendiri.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip yang mendasari hak-hak anak, ketika prinsip ini tidak terpenuhi maka hak anak dianggap tidak terpenuhi pula. Prinsip ini ada di dalam Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak,

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.”¹³

Unsur dalam pasal tersebut adalah “semua tindakan dan menyangkut anak.” Sedangkan pelaku kebijakan dalam ayat ini adalah Lembaga

¹² Ahmad (2/182), Abu Dawud (2276) dan al Hakim (2/247). Syaikh al Albani menilainya sebagai hadits hasan: <https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>

¹³ Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Internasional mengenai Hak Anak

Kesejahteraan Sosial Pemerintah, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pengadilan, Penguasa-penguasa Pemerintah, dan Badan Legislatif.

Hal ini bisa dilihat dalam kasus perebutan hak asuh anak, seperti perebutan hak asuh anak yang terjadi di Pengadilan Agama Arga Makmur pada putusan perkara nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM yang kemudian dikuatkan oleh putusan PTA Bengkulu nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn bahwa hak asuh diberikan kepada ibunya, akan tetapi anak tersebut tetap ingin tinggal bersama ayahnya.

Pada kasus sengketa anak tersebut penggugat (isteri) menggugat hak asuh anak bernama (**ZNY**) yang berada di Tergugat (suami). Atas gugatan tersebut hakim Pengadilan Agama Arga Makmur menjatuhkan putusan:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi.
- b. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **ZNY**, perempuan, lahir tanggal 6 Januari 2017 (umur 5 tahun 8 bulan) berada di bawah hak asuh Penggugat Konvensi.
- c. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Konvensi.
- d. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hidup anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
- e. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dan/atau mengajak pergi bersama pada hari-hari tertentu yang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan pendidikan anak tersebut.¹⁴

Atas putusan tersebut Tergugat tidak menerima kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Putusan Pengadilan Arga Makmur kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding melalui

¹⁴ Putusan Pengadilan Arga Makmur nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn tertanggal 17 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 539/Pdt.G/2022/PA.AGM. tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama **ZNY**, perempuan, lahir tanggal 6 Januari 2017 (umur 5 tahun 8 bulan) berada di bawah hak asuh Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Konvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan atau mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak/biaya hidup anak sebagaimana diktum angka 2 di atas sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Konvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 persen dalam setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan ini menyoroti situasi yang menjadi kompleks ketika putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah berkekuatan hukum tetap Penggugat Konvensi ingin melakukan pengambilan anak secara sepihak tanpa

persetujuan Tergugat konvensi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prosedur hukum yang berlaku dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengganggu stabilitas emosional anak, bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana Rumusan Rapat Koordinasi antara Ditjen Badilag, Kamar Agama, PTA dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019.¹⁵

Dalam kondisi di mana orang tua anak telah bercerai, seringkali terjadi kehilangan kasih sayang dari salah satu atau kedua orang tua, yang dapat mengakibatkan anak menjadi murung, sedih, dan merasa terisolasi, terutama ketika melihat teman sebayanya yang masih dapat bersama dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam penetapan hak asuh, Majelis Hakim wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak. Hakim harus memastikan bahwa penetapan hak asuh diarahkan agar anak dapat berkembang secara psikologis dan sosial sebagaimana anak seusianya yang dalam kondisi keluarga yang harmonis, untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Majelis Hakim tingkat banding belum mempertimbangkan secara menyeluruh kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan ini khususnya terkait kurangnya pendalaman terhadap aspek pendidikan agama dan intelektual anak. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip *maqashid syariah* yang belum sepenuhnya optimal, terutama dalam pemeliharaan agama (*hifzh al-din*) dan pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*). Dengan memberikan hak

¹⁵ Joni dan Rifqi, *Hukum Acara Perdata Dalam Ranah Kepaniteraan dan Kejurusitaan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2023), h. 123

hadhanah kepada Penggugat/Terbanding dan menekankan pentingnya peran kedua orang tua dalam tumbuh kembang anak, putusan ini diharapkan dapat menjamin kesejahteraan anak baik secara fisik maupun psikologis.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik perhatian peneliti untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh alasan hukum yang mendasari putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam penyelesaian sengketa Hak Asuh Anak yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul “**Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Perspektif Maqasid Syari’ah)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan Kriteria Pengambilan Keputusan Hakim
Kurangnya standar baku dan pedoman yang jelas dalam penentuan hak asuh anak sering kali membuat keputusan hakim menjadi subjektif. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kasus-kasus yang serupa namun menghasilkan putusan yang berbeda.
2. Kesesuaian Putusan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak.
Ada kekhawatiran bahwa putusan yang diambil tidak selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak secara komprehensif. Beberapa

¹⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah *"Menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan."*

pertimbangan mungkin lebih fokus pada kepentingan orang tua atau pihak ketiga yang terlibat dalam sengketa, tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan emosional pada anak.

3. Durasi dan Proses Penyelesaian Sengketa yang Berkepanjangan. Sengketa hak asuh yang berlarut-larut di Pengadilan Agama dapat berdampak negatif pada stabilitas psikologis anak. Keterlambatan dalam penyelesaian sengketa sering kali menambah beban emosional pada anak yang sedang berada di tengah konflik keluarga.

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penelitian agar fokus kepada suatu permasalahan peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini yakni hanya pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn dalam perspektif maqasid syari'ah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutuskan sengketa Hak Asuh Anak berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn?
2. Bagaimana relevansi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn dengan Prinsip *Maqasid Syari'ah*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam memutuskan sengketa Hak Asuh Anak berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn dengan Prinsip *Maqasid Syari'ah*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfa'at/kegunaan teoritis dan praktis baik bagi peneliti secara pribadi maupun bagi khalayak umum.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan dan membantu bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan keilmuan melalui penelitian yang lebih jauh terkait sengketa hak asuh anak di Lembaga Peradilan.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mencari gambaran utuh mengenai persoalan sengketa hak asuh anak dalam putusan hakim Pengadilan Agama terkait pemenuhan hak-hak anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang sengketa hak asuh anak banyak dilakukan, namun belum ada yang secara khusus membahas tentang asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sengketa hak asuh anak di Lembaga peradilan agama. Sejauh

data yang diperoleh ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian Muchammad, Lc, yang membahas tentang hak Asuh anak akibat perceraian terhadap ibu berstatus gangguan Bipolar (gangguan suasana) Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014/PAJP). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian library research (penelitian kepustakaan). Dengan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Adapun dalam pengumpulan data penyusun menggunakan teknik dokumentasi. Dalam analisis, menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu penggambaran dilakukan dengan menyajikan fakta secara sistematis yang mempermudah dalam memahami dan menarik kesimpulannya. Kemudian, dianalisa dengan menggunakan teori masalah, dengan menggunakan pendekatan normatif : ushul fiqih, dengan menggunakan teori masalah milik Al-Gazali untuk menjelaskan kasus di atas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pada pokok masalah pertama ada beberapa pertimbangan dalam menentukan hak asuh anak, diantaranya adalah mukallaf, yang bertujuan untuk memberikan kebaikan anak di masa depan. Dalam doktrin agama Islam, hak asuh anak tidak serta merta dapat diberikan dengan mudah, yang diutamakan adalah hasil putusan tentang hak asuh anak tersebut dapat berdampak positif untuk kehidupan anak di masa depan.¹⁷

¹⁷ Muchammad, "Hak Asuh anak akibat perceraian terhadap ibu berstatus Bipolar Disorder Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0419/Pdt.G/2014/PAJP," (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

2. Penelitian Nora Eka Putri, yang membahas tentang Hak Haḍānah pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung). Tesis ini, menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pengasuhan anak di bawah umur kepada ayah berlandaskan pada konsep kemashlahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Upaya hakim menggunakan *contra legem* terhadap ketentuan Pasal 105 KHI menjadi pengejawantahan dari sifat progresif dalam hukum yang bermakna hukum tidak terpaku pada legalistik aturan hukum, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Langkah tersebut dapat dimengerti bahwa ketentuan hukum mengenai pengasuhan anak pada hakikatnya bersifat relatif, alternatif, dan komprehensif. Kesimpulan tersebut diakui oleh penulisnya bersifat mendukung pendapat dari Abdul Manan dan Jerome Frank yang menyebutkan hakim harus memiliki kemampuan untuk berijtihad secara aktual, dan tujuan utamanya adalah menciptakan hukum supaya lebih responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Kesimpulan tersebut berlainan dengan apa yang disampaikan Dennis Patterson Rutgers yaitu: hakim dalam menjalankan tugasnya hanya sebagai pelaksana undang-undang, dan hasil ijtihadnya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam praktek hukum. Penelitian ini juga menolak pendapat Soetandyo Wigjosoebroto yang mengatakan hakim sebagai pelaksana hukum dan putusan-putusannya tidak bisa menjadi norma hukum. Norma hukum bersumber dari undang-undang yang digunakan sebagai acuan seorang hakim dalam memutuskan perkara.¹⁸

¹⁸ Nora Eka Putri. Judul: Hak Hadhanah pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung), (Tesis Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

3. Penelitian M. Natsir Asnawi, yang membahas tentang Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam sengketa hak asuh anak. Legalitas hak asuh anak di Indonesia, dari aspek normatif maupun praktik, pada umumnya masih menggunakan pola pengasuhan terpisah atau pengasuhan yang dilakukan salah seorang dari orangtua anak. Kecenderungan dalam penentuan hak asuh dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak menggunakan dua pendekatan yaitu: Kesatu, secara normatif berpedoman pada ketentuan Pasal 105 KHI. Kedua, demi kepentingan terbaik sang anak yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung. Pengasuhan bersama (shared parenting) diarahkan sebagai gagasan yang hendak menengahi perbedaan diantara dua model dan pilihan tersebut di atas, serta menawarkan suatu pola pengasuhan yang tidak semata berfokus pada terwujudnya kepentingan terbaik anak, akan tetapi juga mengusahakan agar peran kedua orangtua maksimal dalam mengasuh anaknya.¹⁹

H. Kerangka Teori

1. Teori Analisis Putusan

Proses penegakan hukum guna mendapatkan kepastian hukum untuk memastikan bahwa keadilan di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.²⁰

Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah

¹⁹ M. Natsir Asnawi, "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) dalam sengketa hak asuh anak", dalam Jurnal pada AL-Iqtishadiyah, Volume 5, Nomor 1 tahun 2019,

²⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Problematika Hukum dan Peradilan. Cet. 1 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014): 6

dijatuhkan merupakan peran pengadilan (hakim). Putusan hakim seringkali memunculkan tudingan sinis dari masyarakat, sehingga dapat dibuktikan dengan adanya keluhan tentang putusan yang dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.²¹

Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.²²

Hal senada juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, diantaranya. Moh. Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²³

Sementara itu, beberapa ahli hukum lainnya, seperti Mukti Arto dan Ahmad Mujahidin, memberikan defenisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Mukti Arto memberikan defenisi putusan hakim ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk

²¹ Wijayanta, Tata. "Asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.2 (2014): 216-217, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291>

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), h. 158

²³ Moh. Taufik Makarao, Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 124

umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).²⁴ Sedangkan Ahmad Mujahidin memberikan pengertian putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam sidang peradilan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa para pihak. Pada sisi lain istilah putusan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berpekar.²⁵

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Teori Penalaran Hukum (*legal reasoning*).

Dengan teori penalaran hukum. Hakim menempati posisi sentral dalam melahirkan putusan yang memenuhi nilai dan rasa keadilan hukum masyarakat. Pada hakikatnya, yang dilakukan hakim apabila kepadanya dihadapkan peristiwa konkret, kasus atau konflik kepentingan, ia harus

²⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h 251

²⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), h, 337

menyelesaikan secara tuntas. Untuk itu hakim harus tahu, mencari dan menemukan hukum untuk diterapkan pada kasus yang dihadapkan kepadanya. Melalui penalaran hukum (*legal reasoning*) yang baik yang kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum, dapat diketahui dasar pemikiran hakim untuk sampai pada suatu kesimpulan. Ilmu hukum telah melahirkan dua metode pendekatan yang dapat diterapkan hakim, meskipun antar kedua terus menjadi diskursus di kalangan ahli hukum, yaitu:

a. Metode *heteronomy jurisprudence* ;

Menurut metode Heteronomi hakim dalam menjatuhkan putusan tidak harus terpaku pada satu-satunya sumber hukum, namun harus mempertimbangkan dengan sumber-sumber hukum lain, termasuk berbagai disiplin ilmu.²⁶ Dalam praktek hukum di pengadilan, penganut metode ini disebut juga penganut aliran hukum bebas.²⁷ Ajaran hukum bebas asal mulanya dari ajaran sosiologis yang radikal, yang dikembangkan oleh Realisme Amerika, yang intinya kebenaran tidak terdapat dalam teori, melainkan dalam praktek, sehingga hakim tidak menafsirkan undang-undang secara teori (logis-sistematis), melainkan secara praktis.²⁸

²⁶ Jezy Stelmach and Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning* (The Netherlands: Springer, 2006), h.3.

²⁷ Theo Huijebbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 123.

²⁸ Theo Huijebbers, *Filsafat Hukum*, h.124

b. Metode *autonomy jurisprudence*;

Metode *autonomy* menghendaki hukum terpisah dari hal-hal yang ada di luar dirinya, termasuk ilmu pengetahuan lainnya. Hakim dalam menemukan hukum tidak boleh menggali pemikiran hukum dari luar konstruksi hukum itu sendiri. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh aliran positivistic dan legalistic (*legisme*) sistem hukum, yang bertumpu pada paham positivisme, yang berkembang di Perancis pada dasawarsa pertama abad ke 19. Paham positivisme yang melihat hukum sebagai perintah, hukum tidak ada kaitan hubungan dengan moral.

Penerapan positivisme dalam hukum berupa dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sehingga eksistensi setiap norma hukum ditentukan oleh keberadaannya secara obyektif sebagai norma-norma positif yang merupakan kesepakatan dari kontrak sosial. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak mengenai hakekat keadilan, melainkan semata-mata untuk menjamin kepastian tentang apa yang hukum dan apa yang bukan hukum. Menurut John Austin, hukum harus dipahami sebagai; (a) perintah penguasa yang berdaulat; (b) hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (*close logical system*), sehingga ilmu hukum (*yurisprudensi*) dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri; (c) hukum positif harus memenuhi beberapa unsur yaitu unsur perintah (*command*),

kewajiban (*duty*), sangsi dan kedaulatan.²⁹ Di antara penganut metode otonomi ini, selain *Legal positivism* adalah; *Roman Jurisprudence*, *Hystorical School*, *Legal positivisme*.³⁰

Dari dua metode yang ditawarkan di atas, tidak ada satu metode yang diterima secara universal, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.³¹ Perbedaan sesungguhnya adalah pada ruang lingkup kebebasan hakim dalam menemukan hukum, apakah hakim mencukupkan dengan undang-undang sebagai sumber satu satunya, atau diperlukan sumber lain, untuk mencapai pertimbangan hukum yang baik.

3. Teori *Maqasid Syari'ah*

Konsep *maqāsid syarī'ah* pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang bertumpu pada wahyu Ilahi. Konsep ini tentunya menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum tidak begitu saja. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam

²⁹ Senada dengan Austin, H.L.A. Hart juga berpandangan bahwa undang-undang adalah perintah manusia (*laws are commands of human being*), tidak perlu ada hubungan hukum dan moral, sistem hukum adalah sistem logis tertutup. Mukhtie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, h.11.

³⁰ Jezy Stelmach and Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, h. 7-8.

³¹ Jezy Stelmach and Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, h, 9-10.

bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.³²

Teori *maqashid syari'ah*, sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi, hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.³³ Sesuai dengan hukum Islam, dispensasi kawin dapat dilihat dari nilai kemaslahatannya, baik secara individu dan sosial. Jika dispensasi kawin tidak didasarkan pada aturan-aturan yang membatasinya dan syarat-syarat tertentu, maka akan menimbulkan kemadharatan yang akibatnya akan dirasakan.

Dalam Qawaid Fiqhiyyah dijelaskan: *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya: “*madharat itu harus dihilangkan*”. Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah jika dispensasi kawin tidak diberikan maka akan menimbulkan kemudharatan-kemudharatan yang dapat mengancam jiwa keduanya seperti melakukan perzinahan.

Oleh karena itu, hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak harus melihat secara komprehensif baik dari segi manfaat dan mudharat karena tujuan hukum Islam adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.³⁴ Jadi dalam sebuah hukum yang telah disyari'atkan oleh syar'i tentu tidak lepas dari prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*. Dalam hal ini *maqashid syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar

³² Imam Syathibi, *Al-Muwafaqaat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) h. 220

³³ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25.

³⁴ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, h.38

kemaslahatan pada makhluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³⁵

Salah satu aspek *maqashid syari'ah* membagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu:

- 1) *Daruriyat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
- 2) *Hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
- 3) *Tahsiniyat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.³⁶

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal ini terdapat dari 5 bab, dimana masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa sub bab, yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas, yaitu:

³⁵ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, h. 45

³⁶ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, h. 25-26

Bab I berisikan pendahuluan. Pada Bab ini akan memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Dalam bab II ini, penulis akan menguraikan tentang konsep tentang hak asuh anak, dan maqasid syari'ah.

Bab III metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, prosedur pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV hasil dari penelitian dan pembahasan, yaitu konsep pemeliharaan anak akibat perceraian dalam UU perkawinan dan KHI dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan sengketa Hak Asuh Anak berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2023/PTA.Bn perspektif maqasid syari'ah.

Bab V Penutup. Pada Bab V ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis sebagai upaya pemecahan masalah yang terjadi.